

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Erwin *dkk*, Manajemen keuangan pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap seluruh fungsi keuangan dalam suatu organisasi. Pengelolaan ini mencakup dua kegiatan utama: yang pertama adalah cara mendapatkan atau menghimpun dana (*raising of fund*), dan yang kedua adalah cara memanfaatkan atau mengalokasikan dana yang telah diperoleh tersebut (*allocation of fund*).¹³

James C. van Horne dalam buku Pengantar Manajemen Keuangan, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan beberapa tujuan menyuluruh.¹⁴

Manajemen keuangan adalah cara mengatur dan mengelola uang dalam sebuah bisnis atau Organisasi agar perusahaan atau lembaga bisa berjalan dengan lancar, sehat secara keuangan, dan meraih keuntungan. Dalam praktiknya, manajemen keuangan mencakup bagaimana perusahaan merencanakan pemasukan dan pengeluaran, mengelola arus kas, mengambil keputusan investasi, serta menentukan sumber pendanaan yang tepat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan atau memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajiban, menjalankan operasional sehari-hari, dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan manajemen keuangan yang

¹³ Erwin Dyah Astawinetu and Sri Handini, *Manajemen Keuangan: Teori Dan Praktek*, SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020.

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*, Prenada Media, Jakarta, 2016.

baik, sebuah bisnis atau organisasi bisa membuat keputusan yang bijak, menghindari kerugian, dan memanfaatkan peluang untuk tumbuh.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib dan profesional merupakan bagian integral dari tata kelola lembaga pendidikan yang baik (*good governance*). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam menunjang keberlangsungan dan efektivitas lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dalam praktiknya, manajemen keuangan tidak hanya sebatas kegiatan mengelola dana, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan administratif atau ketatausahaan keuangan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kegiatan tersebut meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam lembaga pendidikan.

Dalam manajemen keuangan, ketepatan waktu pembayaran merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas arus kas dan efektivitas pengelolaan keuangan suatu lembaga. Tingkat keterlambatan pembayaran dapat digunakan untuk menilai kualitas pembayaran serta tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Berdasarkan SE BI NO. 15/28/DPNP, kualitas pembayaran ditetapkan dalam lima kategori penilaian,¹⁵ yaitu:

- a. Lancar : tepat waktu
- b. Dalam perhatian : terlambat 90 hari
- c. Kurang lancar : terlambat 90 – 180 hari
- d. Diragukan : terlambat 180 – 270 hari

¹⁵ Wangsawidjaja Zaelani, *Kredit Bank Umm - Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Penerbit Andi, 2020.

- e. Macet : terlambat lebih dari 270 hari

1. Tujuan Manajemen Keuangan

Dalam manajemen keuangan perusahaan atau organisasi ada beberapa tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan atau organisasi yang harus dicapai adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Memaksimalkan nilai *shareholder*.

Tujuan manajemen keuangan ini dinilai lebih superior dibandingkan sekadar memaksimalkan keuntungan perusahaan. Memaksimalkan nilai pemegang saham (*shareholder*) sama dengan meningkatkan nilai perusahaan. Sama seperti tujuan sebelumnya, hal ini juga menjadi tugas Manajer Keuangan dan Pengawas Keuangan. Nilai perusahaan itu sendiri setara dengan total nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang perusahaan.

- b. Menjaga kelancaran arus kas.

Tujuan manajemen keuangan selanjutnya adalah menjaga kelancaran arus kas. Sebuah perusahaan harus memiliki arus kas yang sehat untuk bisa memenuhi biaya sehari-hari seperti pembelian bahan baku, bayar gaji pegawai, bayar sewa, membayar tagihan listrik, dan masih banyak lagi.

Dengan arus kas yang sehat, maka perusahaan dapat bertahan lebih lama dan mampu menghadapi krisis dengan

¹⁶ Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, and Eni Puji Estuti, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*, Penerbit NEM, 2022.

baik. Dengan demikian, kesempatan perusahaan untuk meraih kesuksesan juga lebih besar.

c. Kemampuan perusahaan bertahan.

Tujuan manajemen keuangan yang berikutnya adalah perusahaan mampu bertahan. Bisnis adalah dunia yang sangat dinamis dan kompetitif, oleh karena itu lebih dari apapun sebuah perusahaan harus mampu bertahan. Terutama dalam kondisi yang tidak stabil seperti terjadi krisis secara global maupun regional yang mengganggu kestabilan sistem ekonomi. Manajer keuangan harus sangat teliti dan berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan.

d. Mengumpulkan dana cadangan.

Kondisi keuangan bisa dikatakan stabil Apabila mereka memiliki dana cadangan. Itulah mengapa mengumpulkan dana cadangan harus menjadi salah satu tujuan manajemen keuangan. Perusahaan tidak seharusnya membagikan semua keuntungan yang mereka peroleh kepada para pemegang saham hingga habis, namun harus mengambil sebagian dari keuntungan tersebut sebagai cadangan. Di masa depan, dana cadangan tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan melakukan ekspansi.

2. Fungsi Manajemen Keuangan.

Manajemen keuangan memiliki sejumlah fungsi penting yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi.¹⁷ Fungsi pertama adalah perencanaan keuangan, yakni mencakup penyusunan rencana penggunaan dana jangka pendek seperti operasional harian atau rutin dan jangka panjang seperti pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Perencanaan yang matang sangat penting untuk mengantisipasi kendala keuangan dan menyiapkan langkah strategis.

Fungsi manajemen keuangan berikutnya adalah penganggaran dan pengelolaan kas. Penganggaran adalah proses menyusun rencana dana yang realistis, berfungsi sebagai pedoman dan instrumen pengendali untuk memastikan pengeluaran sesuai prioritas. Sementara itu, pengelolaan kas berfokus pada pengaturan arus kas masuk dan keluar demi menjaga likuiditas organisasi. Kelancaran arus kas sangat krusial agar organisasi selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Selain itu, terdapat pula fungsi pengelolaan piutang dan utang. Pengelolaan piutang bertujuan mempercepat penerimaan dana yang tertunda, sementara pengelolaan utang yang tepat menjaga kepercayaan dan stabilitas finansial. Keseimbangan antara piutang dan utang sangat penting untuk mendukung kelancaran *likuiditas*. Fungsi selanjutnya adalah investasi. Fungsi investasi berkaitan dengan pengalokasian dana untuk memperoleh aset tetap atau produktif guna mendukung

¹⁷ Rivaldi Arissaputra et al., *Sistem Pengendalian Fungsi-Fungsi Manajemen*, CV. Intelektual Manifes Media, 2024.

pertumbuhan organisasi, dengan mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan investasi.¹⁸

Fungsi terakhir manajemen keuangan adalah pengendalian keuangan, yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan penggunaan dana agar sesuai dengan rencana dan anggaran. Pengendalian ini vital untuk mencegah penyimpangan, pemborosan, atau penyalahgunaan dana, memastikan bahwa seluruh dana dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa fungsi manajemen keuangan saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem. Perencanaan memberikan arah, penganggaran menetapkan pedoman, pengelolaan kas menjamin kelancaran likuiditas, pengelolaan piutang dan utang menjaga keseimbangan keuangan, investasi mendukung pertumbuhan jangka panjang, dan pengendalian memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan organisasi. Keenam fungsi ini menjadi kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan bagaimana organisasi mengatur, memanfaatkan, dan mempertanggung jawabkan sumber keuangannya.

3. Skala Prioritas.

Kriteria skala prioritas adalah metode pengelompokan tugas atau kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya (seperti *Eisenhower Matrix*)¹⁹ untuk memaksimalkan produktivitas dan efisiensi.

¹⁸ Wulan Ayuandiani et al., *Manajemen Keuangan*, Azzia Karya Bersama, 2025.

¹⁹ Lala Diana, *Dari Luka Menjadi Cahaya: Bangkit Dari Kegagalan Hidup*, CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.

Skala prioritas yang tepat yaitu dengan mendahulukan pekerjaan yang penting dan mendesak, kemudian pekerjaan yang mendesak meski tidak begitu penting, tidak dilanjutkan dengan pekerjaan yang penting dan tidak mendesak. Prioritas terakhir adalah pekerjaan yang tidak penting juga tidak mendesak.²⁰

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi, prinsip tersebut menjadi dasar dalam menyusun skala prioritas pengeluaran. Dana yang tersedia harus terlebih dahulu dialokasikan untuk kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak, seperti operasional utama dan kewajiban yang tidak dapat ditunda. Selanjutnya, pengeluaran yang penting namun tidak mendesak dapat direncanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Adapun kebutuhan yang tidak terlalu penting maupun tidak mendesak sebaiknya ditunda atau dievaluasi kembali agar tidak mengganggu stabilitas keuangan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Adapun kriteria skala prioritas dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. *Urgent And Important* (mendesak dan penting).
- b. *Not Urgent But Important* (penting).
- c. *Urgent But Not Important* (mendesak).
- d. *Not Urgent And Not Important* (tidak penting dan tidak mendesak).

²⁰ Safrudin, Sri Mulyati, and Rosni Lubis, *Pengembangan Kepribadian Dan Profesionalisme Bidan*, Wineka Media, 2019.

B. Manajemen Keuangan Pesantren

Menurut Hilyati dkk, Manajemen Keuangan pada lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai rangkaian dalam pengaturan keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban.²¹

Menurut Miftakhol Arifin, Manajemen keuangan pondok pesantren adalah serangkaian proses dalam mengatur aktivitas keuangan yang berlangsung di lingkungan pondok pesantren serta lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya. Proses ini mencakup kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan, yang umumnya dilaksanakan oleh ketua pengurus dan bendahara, serta oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah pada lembaga pendidikan formal yang terkait.²² Manajemen keuangan di pesantren mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh dana dengan biaya serendah mungkin, serta mengelola dan mengalokasikannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Pengertian di atas dapat Simpulkan bahwa Manajemen keuangan pondok pesantren adalah proses mengatur dan mengelola semua pemasukan dan pengeluaran secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan kegiatan pendidikan dan pelayanan. Proses ini mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan dana operasional dari berbagai sumber (seperti iuran santri, wakaf, dan usaha), pencatatan, serta pengawasan. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas

²¹ Dewi Laela Hilyati and Akhris Fuadatis Sholikha, *Manajemen Keuangan Pesantren*, wawasan Ilmu, 2022.

²² Miftahol Arifin, "Manajemen keuangan pondok pesantren," *Fikrotuna*, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, 2017.

keuangan dan memastikan dana dikelola sesuai prinsip amanah, efisien, dan syariat, demi mendukung tercapainya visi pesantren dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²³

Perencanaan keuangan pondok pesantren merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pemantauan terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pondok pesantren. Tujuan utama dari perencanaan keuangan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas pendidikan, pengembangan, serta operasional di lingkungan pondok pesantren.²⁴

Identifikasi kebutuhan merupakan suatu proses untuk mengetahui serta menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah entitas atau organisasi. Dalam lingkungan pondok pesantren, proses ini mencakup penelaahan terhadap beragam aspek, seperti operasional, kegiatan pendidikan, sarana dan prasarana, serta program pengembangan yang

²³ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan Teori, Kebijakan, dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017.

²⁴ Abdurrahman, Z. *Manajemen Keuangan Pesantren : Teori, Konsep, dan Praktek*. Prenada Media Grop, 2018.

dibutuhkan agar pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan pondok pesantren dapat berlangsung secara optimal.²⁵

Manajemen sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan sangat penting bagi kelancaran proses belajar dan pengembangan karakter santri. Pengelolaan sarana (seperti asrama, masjid, dan ruang belajar) harus dilakukan secara tertib dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kondusif. Sementara itu, manajemen pembiayaan yang bersumber dari iuran, donatur, wakaf, dan lainnya, harus dilaksanakan secara transparan, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan yang baik atas kedua aspek ini secara langsung memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan keberlanjutan pesantren dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak.

Menurut Wahyudin, Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berupa tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada lembaga pendidikan.²⁶ Sedangkan menurut Aminudin, Manajemen keuangan pendidikan adalah proses mengelola perolehan dan penggunaan dana secara efektif dan efisien, sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.²⁷

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib dan profesional merupakan bagian integral dari tata kelola lembaga pendidikan yang baik

²⁵ Setiawan & Muhammad Hasyim, *Perencanaan dan Penganggaran Dana Pendidikan Pesantren*, PT Remaja Rosdakarya, 2016.

²⁶ Undang Ruslan Wahyudin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*, Deepublish, 2021.

²⁷ Muchammad Aminudin, Aeni Rahmawati, and Efitra, *Manajemen Pondok Pesantren*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

(*good governance*). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam menunjang keberlangsungan dan efektivitas lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dalam praktiknya, manajemen keuangan tidak hanya sebatas kegiatan mengelola dana, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan administratif atau ketatausahaan keuangan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kegiatan tersebut meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam lembaga pendidikan.

Dalam konteks lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, pembiayaan pendidikan merupakan aspek yang sangat krusial dalam menunjang jalannya proses belajar mengajar dan seluruh kegiatan operasional lembaga. Sumber keuangan dan pembiayaan pendidikan pondok pesantren berasal dari penghasilan aset pesantren, iuran wajib santri, bantuan pemerintah, sumbangan alumni dan simpatisan, bantuan kerjasama kelembagaan atau perusahaan dan uang pribadi pengasuh pesantren.²⁸

Dana-dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional pondok pesantren, baik dalam kegiatan harian maupun program-program tahunan. Kegiatan operasional yang dimaksud meliputi pembayaran honor guru atau asatidz, penyediaan sarana dan prasarana belajar, pemeliharaan fasilitas pesantren, pembelian alat tulis dan perlengkapan pembelajaran, serta kegiatan pembinaan santri seperti kajian rutin, program tahfidz, perlombaan, pesantren kilat, atau kegiatan akhir tahun

²⁸ Fauzan Adhim, *Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren*, Literasi Nusantara, 2020.

ajaran. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun moral, apalagi dalam konteks pesantren yang menjunjung tinggi prinsip syari'ah.

Dalam manajemen keuangan pesantren, sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Pengurus dan bendahara pesantren memiliki peran strategis dalam perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pengendalian keuangan pesantren. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

SDM sebagai salah satu unsur penting memiliki arti dan fungsi strategis bagi suatu perusahaan atau lembaga. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan atau lembaga dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sangat tergantung kepada kemampuan SDM-nya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.²⁹

Melalui pengelolaan pembiayaan yang baik dari kedua sumber tersebut, pondok pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikannya dengan optimal serta terus berkembang dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi para santri.

C. Pengertian Kepatuhan Finansial.

Menurut Chayes, kepatuhan dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi yang berfokus pada kejelasan aturan serta keterbukaan informasi.

²⁹ M Soleh Mauludin and Zakiyatus Soimah, "Rekontruksi Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Operasional Perbankan (Studi Literasi Teori Motivasi)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2023.

Ambiguitas dalam suatu regulasi atau perjanjian perlu diminimalisasi dengan memperjelas aturan melalui ketentuan yang lebih spesifik. Meskipun demikian, tingkat kekhususan tersebut sering kali menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya intensitas tawar-menawar antar pihak. Selain itu, perjanjian juga dapat memperkuat kepatuhan dengan menghadirkan sistem informasi yang bersifat transparan. Transparansi di sini mencakup aspek edukasi, ketepatan data, serta keterjangkauan informasi mengenai kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil.³⁰

Lebih jauh, Keterbukaan informasi sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian data, tetapi juga membangun rasa saling percaya, memperkuat legitimasi aturan, dan mengurangi potensi konflik. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada mekanisme pengawasan dan sanksi, tetapi juga pada penciptaan sistem regulasi yang jelas, transparan, serta mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat.

Implementasi kebijakan berarti implementasi dari suatu kebijakan atau program. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan publik memuat serangkaian kegiatan atau tindakan yang secara operasional merupakan pedoman dan panduan sekaligus Kerangka kerja, melalui cara mana organisasi tersebut dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya baik mekanisme maupun program dalam memecahkan persoalan publik yang dihadapinya.³¹

³⁰ Walter Carlsnaes, *Hukum Internasional, Hubungan Internasional dan Kepatuhan: Handbook Hubungan Internasional*, Nusamedia, 2021.

³¹ A P Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, Nusamedia, 2019.

Kepatuhan finansial adalah tingkat ketaatan seseorang dalam menjalankan rencana keuangan yang telah disusun, termasuk dalam hal mengatur pengeluaran, menabung, membayar kewajiban, dan mengelola pendapatan sesuai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Tantangan utama dalam mencapai kepatuhan ini adalah kesulitan untuk konsisten, sering kali disebabkan oleh godaan pengeluaran impulsif atau kurangnya kedisiplinan. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan, seperti keluarga atau teman, seringkali menjadi faktor penting untuk membantu seseorang tetap patuh pada komitmen keuangannya.³²

Kepatuhan finansial (keuangan) dipengaruhi oleh kombinasi literasi keuangan, perilaku, dan faktor eksternal, yang meliputi pengelolaan pendapatan/pengeluaran, tingkat utang, tujuan keuangan, serta pemahaman akan aturan pajak. Kepatuhan yang baik tercapai melalui disiplin menabung, investasi, manajemen risiko, serta penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses keuangan.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan finansial:

1. Literasi dan Pengetahuan Keuangan.

Tingkat pendidikan dan pemahaman akan produk keuangan, pajak, serta manajemen risiko sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang bijak.

2. Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*).

Kebiasaan sehari-hari seperti disiplin dalam penganggaran (misalnya menggunakan formula 50/30/20), menabung, dan

³² Anggulyah Rizqi Amaliyah et al., *Manajemen Keuangan : Teori dan Praktik dalam Mencapai Financial Freedom*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

menghindari hutang konsumtif berperan langsung dalam kepatuhan keuangan.

3. Pengalaman Keuangan.

Pengalaman masa lalu dalam mengelola keuangan mempengaruhi cara individu menangani situasi keuangan saat ini.

4. Lingkungan Sosial dan Sosial-Budaya.

Pengaruh orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial membentuk perilaku seseorang terhadap uang.

5. Tujuan Keuangan.

Adanya tujuan jangka pendek atau panjang (misalnya liburan, haji, pensiun) memotivasi individu untuk tetap patuh pada rencana keuangan.

6. Faktor Eksternal/Teknologi.

Penggunaan teknologi (*fintech*) untuk mengotomatiskan pencatatan dan pembayaran membantu meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi kepatuhan.

7. Kepatuhan Peraturan (Pajak/Syariah).

Bagi individu atau bisnis, kepatuhan juga mencakup pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah jika relevan.³³

Dalam konteks Pondok Pesantren, kepatuhan finansial dapat tercermin dari perilaku wali santri atau santri dalam memenuhi tanggungan pembayaran *syahriah* bulanan. Meskipun sebagian santri atau walinya menunjukkan

³³ Alan Hidayat, "Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang," 2019.

kepatuhan dengan membayar tepat waktu, sebagian lainnya justru mengalami keterlambatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan finansial, di mana keberhasilan dalam mengikuti perencanaan keuangan sangat bergantung pada disiplin diri dan kemampuan mengelola godaan pengeluaran yang tidak direncanakan.

Menurut Suharsimi Arikunto, teknik persentase digunakan untuk mengkategorikan suatu kondisi ke dalam beberapa kriteria. sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : 76% - 100%
- b. Cukup Baik : 56% - 75%
- c. Kurang Baik : 40% - 55%
- d. Tidak Baik : Kurang dari 40%.³⁴

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.